

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENGUKUR TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA BIMA

Dian Tifani¹

diantifani01@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Wirawan Suhaedi²

wirawan.suhaedi@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Intan Rakhmawati³

intan.rakhmawati@unram.ac.id

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kontribusi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mengukur tingkat kemandirian daerah periode 2017-2021. Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio kemandirian daerah, desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kota Bima cukup efektif dengan persentase 92,79%, rasio kemandirian daerah memiliki kemampuan keuangan rendah sekali dengan rata-rata persentase 7,37%, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah memiliki kemampuan keuangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 6,68%, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah memiliki kemampuan keuangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 6,23%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kemandirian Daerah, Kontribusi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the level of contribution and effectiveness of Regional Original Income to the Regional Revenue and Expenditure Budget in measuring the level of regional independence for the 2017-2021 period. This type of research is a form of descriptive research using a quantitative approach. Data collection is carried out by the method of documentation. The data analysis process is carried out using the effectiveness ratio, regional independence ratio, fiscal decentralization, and growth ratio. The results of this study show that the average level of effectiveness of Regional Native Income in Bima City is quite effective with a percentage of 92.79%, the ratio of regional independence has very low financial capabilities with an average percentage of 7.37%, the contribution of Regional Original Income to Regional Revenue has very less financial ability with an average percentage of 6.68%, and the contribution of Local Revenue to regional expenditures has a very less financial capability with an average percentage of 6.23%.

Keywords: Effectiveness, Regional Independence, Contribution

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya, di mana indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Salah satu upaya mendorong kemandirian daerah yaitu melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah rincian target dan realisasi PAD Kota Bima tahun 2017-2021.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Bima tahun 2017-2021

Pendapatan Asli Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	49.530.899.104,04	52.465.170.257,96
2018	44.309.136.205,20	46.115.436.512,62
2019	58.212.213.108,03	50.472.550.773,00
2020	53.995.874.355,63	47.279.813.936,69
2021	58.906.077.012,12	46.927.855.338,10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya mampu mencapai target hanya dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018, sedangkan tiga tahun lainnya yaitu tahun 2019, 2020, 2021 realisasinya belum mampu mencapai target. Sementara itu, berdasarkan wawancara awal faktor terbesar penyebab ketidaktercapaian realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah yaitu disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak serta banyaknya pemungutan liar seperti parkir yang terjadi dalam izin retribusi Kota Bima. Meskipun parkir bukan penerimaan retribusi yang utama, namun proporsi retribusi pelayanan parkir memiliki peran yang penting terhadap penerimaan retribusi daerah. Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya terhadap daerah menggambarkan Kota Bima belum sampai pada tingkat kemandirian daerah, karena tingkat kemandirian daerah salah satunya dapat dilihat dari partisipasi masyarakatnya dalam membayar pajak, retribusi, maupun pembayaran lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, disebabkan oleh adanya bencana covid-19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian termasuk wajib pajak.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin dan Hairun (2020). Berdasarkan penelitian Sahrudin dan Hairun (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bima dilihat dari Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 100,70%, dan tingkat kemandirian Kabupaten Bima diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 40,64% termasuk dalam pola konsultatif. Kondisi ini menggambarkan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukkan keuangan positif.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2018) menunjukkan rasio efektivitas Kota Medan secara rata-rata berada pada kecenderungan 70-80% dengan kategori kurang efektif, rasio kemandirian secara rata-rata 25-50% dengan kategori rendah, dan rasio desentralisasi secara rata-rata berada pada 40-50% dengan kategori baik. Rendahnya tingkat efektivitas disebabkan oleh pendapatan daerah masih di bawah dari anggaran sebelumnya, sehingga hal ini menyebabkan rendah pula tingkat kemandirian daerah pada Kota Medan. Kondisi ini diakibatkan oleh belum maksimalnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam membayar pajak dan retribusi. Selain itu, disebabkan oleh perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan; a) Menganalisis tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kota Bima, b) Menganalisis tingkat kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap Anggaran dan Belanja Daerah dalam hubungannya dengan tingkat kemandiriandaerah di Kota Bima, c) Menganalisis tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bima, d) Menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah dalam menunjang kemandirian daerah di Kota Bima.

TINJAUAN LITERATUR

Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *principals* (masyarakat) dan *steward* (pemerintah). Hubungan ini tercipta karena adanya sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan kejujuran pada pihak lainnya. Implikasi *Stewardship theory* terhadap penelitian ini yaitu dapat dilihat dari hubungan pemerintah selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan masyarakat selaku *principals* sebagai pemilik sumber daya. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk memimpin pemerintahan dan mengelola serta mngoptimalkan sumber penerimaan daerah. Selain itu, *stewardship theory* dapat menjelaskan eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima tahun 2017-2021. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data yang ditempuh peneliti yaitu dengan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio kemandirian daerah, pengukuran desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Efektivitas

Menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dan Kusuma (2014)

Kriteria:

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
85-99%	Cukup Efektif
75%-84%	Kurang Efektif
>75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2015)

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Sumber: Pemendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria:

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327

3. Desentralisasi Fiskal

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah diukur dengan pengukuran desentralisasi fiskal. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio desentralisasi fiskal:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Pemendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Rasio Pertumbuhan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah dengan mengandalkan penerimaan daerah yang berasal dari daerahnya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan:

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{PAD}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Pemendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria Pengukuran desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan:

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Baik
>50.01	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio kemandirian daerah, pengukuran desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan. Berikut merupakan hasil analisis data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bima tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bima

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	49.530.889.104,04	52.465.170.257,96	105,92	Sangat Efektif
2018	44.309.136.205,20	46.115.436.512,62	104,08	Sangat Efektif
2019	58.212.213.108,03	50.422.855.052,00	86,62	Cukup Efektif
2020	53.995.874.355,63	47.279.813.936,69	87,56	Cukup Efektif
2021	58.906.077.012,12	46.993.516.746,67	79,78	Kurang Efektif
Rata-rata	52.990.837.957,00	48.655.358.501,19	92,79	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata persentase pengukuran rasio efektivitas pada tahun 2017-2021 sebesar 92,79%, artinya kemampuan pemerintah Kota Bima dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah cukup efektif. Namun jika dilihat tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017-2021 yang realisasinya mampu mencapai target hanya dua tahun yaitu tahun 2017 dengan persentase 105,92% dan tahun 2018 dengan persentase 104,08% dengan kriteria sangat efektif. Sementara tiga tahun lainnya yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 pemerintah Kota Bima menaikkan target, yang diharapkan realisasinya dapat mencapai 100% seperti tahun sebelumnya. Namun kenyataannya realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan, walaupun terdapat peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Sementara untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah, pemerintah Kota Bima juga sudah membuat Peraturan Walikota Bima Nomor 8 Tahun 2019 mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan juga membuat pengaturan terkait Organisasi Perangkat Daerah penganggungjawab Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan penataan ulang dan penambahan areal parkir, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari pajak maupun retribusi.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut membantu dalam meningkatkan realisasi pajak dan retribusi dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara dari penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah realisasinya tidak mencapai 100% seperti tahun sebelumnya. Dari sisi penerimaan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah sebelumnya realisasi dapat mencapai 100%, kemudian menurun menjadi 86,60%. Dari sisi penerimaan komponen lain-lain PAD yang sah sebelumnya realisasi juga mencapai 100%, kemudian menurun menjadi 97,89%. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target, walaupun terdapat kenaikan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun sebelumnya tetapi belum mampu mencapai target, begitu pula pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah

dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada tidak tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Ketidaktercapaian realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 disebabkan oleh adanya bencana Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sebagai bentuk penanganan penyebarannya. Penerapan ini, membuat sebgaiian besar objek pajak daerah mengalami penurunan aktivitas dan omzet penjualan. Bahkan, terdapat objek pajak daerah menghentikan aktivitas bisnis selama pandemi, sampai batas waktu yang tidak diketahui. Seperti halnya, dengan dengan pendapatan daerah dari sektor perpajakan, dengan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial turut pula berdampak pada pendapatan daerah dari sektor retribusi. Sebab, kebijakan tersebut membuat aktivitas masyarakat, bisnis, dan pelayanan publik terhambat dan terbatas. Oleh karena itu, pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 pemerintah Kota Bima sudah mulai menaikkan target. Hal ini dikarenakan sudah diberlakukannya era new normal, dimana masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali dengan peraturan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan *physical distancing* tetap diterapkan untuk menghindari kerumunan orang agar mencegah penularan virus corona. Oleh karena itu, walaupun sudah diberlakukannya era new normal tetapi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih belum efektif.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bima di berbagai sektor terus ditekankan, salah satunya yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima bekerjasama dengan salah satu BUMN untuk memasang aplikasi amanah E-Pos. Pemasangan aplikasi amanah E-Pos bertujuan untuk merekam data transaksi wajib pajak pelaku usaha, sehingga pemerintah dapat memonitoring jumlah pajak yang akan dihasilkan dari transaksi usaha wajib pajak dan dapat mempermudah pengusaha terhadap kewajibannya membayar pajak daerah (Kahaba.Net, Mei 2022).

2. Kemandirian Daerah

Tabel 3. Rasio Kemandirian Daerah Kota Bima

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Persentase (%)	Tingkat Kemandirian
2017	52.465.170.257	707.754.462.138	7,41	Rendah Sekali
2018	46.115.436.512	640.693.906.827	7,20	Rendah Sekali
2019	50.422.855.052	643.423.884.046	7,84	Rendah Sekali
2020	47.279.813.936	641.947.190.527	7,37	Rendah Sekali
2021	46.993.516.746	668.730.441.894	7,03	Rendah Sekali
Rata-rata	48.655.358.501	660.509.977.086	7,37	Rendah Sekali

Berdasarkan rata-rata pengukuran rasio kemandirian daerah di Kota Bima pada tahun 2017-2021 menunjukkan persentase 7,37% dengan kriteria tingkat kemandirian rendah sekali. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah masih kurang, sehingga pemerintah Kota Bima belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, artinya pemerintah Kota Bima masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Walaupun rata-rata tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 adalah sebesar 92,79% dengan kriteria cukup efektif, tetapi tidak dapat menutupi besarnya pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat.

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 4. Desentralisasi Fiskal Kota Bima Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	52.465.170.257,96	783.336.330.285,96	6,70	Sangat Kurang
2018	46.115.436.512,62	768.070.688.024,82	6,70	Sangat Kurang
2019	50.422.855.052,00	774.410.991.652,00	7,00	Sangat Kurang
2020	47.279.813.936,69	694.600.705.790,44	7,00	Sangat Kurang
2021	46.993.516.746,67	729.687.511.750,67	6,00	Sangat Kurang
Rata-rata	48.655.358.501,19	750.021.245.500,78	6,68	Sangat Kurang

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran desentralisasi fiskal pemerintah Kota Bima periode tahun 2017-2021 menunjukkan persentase 6,68% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu menyumbang bagian terbesar pada pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer dikarenakan pemerintah Kota Bima masih sangat kurang dalam menggali potensi yang dimiliki daerah, sehingga bantuan pemerintah pusat merupakan sumber utama penerimaan daerah juga tergambar dari tingkat kemandirian yang masih rendah sekali.

4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Kota Bima Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	52.465.170.257,96	799.257.829.094,00	6,56	Sangat Kurang
2018	46.115.436.512,62	825.955.415.742,94	5,58	Sangat Kurang
2019	50.422.855.052,00	794.367.538.512,27	6,00	Sangat Kurang
2020	47.279.813.936,69	782.163.084.634,73	6,00	Sangat Kurang
2021	46.993.516.746,67	716.700.153.286,42	7,00	Sangat Kurang
Rata-rata	48.655.358.501,19	783.688.804.254,07	6,23	Sangat Kurang

Berdasarkan rata-rata perhitungan rasio pertumbuhan pemerintah Kota Bima periode tahun 2017-2021 menunjukkan persentase 6,23%, artinya kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki pemerintah Kota Bima masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang tinggi, sehingga untuk memenuhi belanja daerah pemerintah Kota Bima lebih mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang juga tergambar pada tingkat kemandirian daerah di Kota Bima yang rendah sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas Kota Bima tahun 2017-2021 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 92,79%, artinya pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah termasuk dalam kriteria cukup efektif. Namun dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat mencapai target dengan persentase di atas 100% dengan kriteria sangat efektif hanya dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018, sedangkan 3 tahun lainnya yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kemandirian daerah memiliki kemampuan keuangan rendah sekali dengan rata-rata persentase 7,37%. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah masih rendah, sehingga pemerintah Kota Bima belum mampu membiayai

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, artinya pemerintah Kota Bima masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil pengukuran desentralisasi fiskal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah memiliki kemampuan keuangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 6,68%. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah masih rendah, sehingga Pendapatan Asli Daerah belum mampu menyumbang bagian terbesar pada pendapatan daerah. Proporsi tertinggi pada pendapatan daerah adalah dari penerimaan pendapatan transfer.

Berdasarkan hasil pengukuran rasio pertumbuhan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah yang dapat dilihat pada pengukuran rasio pertumbuhan memiliki kemampuan keuangan sangat kurang dengan rata-rata persentase 6,23%, artinya perkembangan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki pemerintah Kota Bima masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, sehingga untuk memenuhi belanja daerah pemerintah Kota Bima lebih mengandalkan bantuan pemerintah pusat.

REFERENSI

- Badan Pengawasan Keuangan dan Perimbangan. 2021. Optimalisasi Pendapatan Daerah Untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/31323/0/Optimalisasi-PendapataDaerah-Untuk-Mewujudkan-Kemandirian-Fiskal-Daerah>, diakses pada 5 Mei 2022.
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Bima Tata Areal Parkir. <https://ntb.bpk.go.id/tingkatkan-pendapatan-asli-daerah-kota-bima-tata-areal-parkir/>, diakses pada 11 Juni 2022 .
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Gardaasakota.com. 2019. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bima Tahun 2019. <https://www.gardaasakota.com/2019/02/target-pad-kota-bima-tahun-2019-capai.html>, diakses pada 18 Agustus 2022.
- Halim, Abdul, and Muhamad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Nurul Hidayah. 2018. Analisis Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.
- Kahaba.Net. 2022. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, BPKAD Pasang Alat Transaksi Amanah E-Pos. <https://kahaba.net/berita-kota-bima/95466/optimalisasi-pad-bpkad-pasang-alat-transaksi-amanah-e-pos.html>, diakses pada 11 Juni 2022.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 17 Agustus 2022.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 17 Agustus 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 Agustus 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 Agustus 2022.
- Sahrudin, and Yasin Hairun. 2020. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan Ips* 10(2): 150–56.